

HABIS DEMOKRASI, TERBIT TIMOKRASI

BASIS

menembus fakta

ASVI WARMAN ADAM

Edhi Sunarso:
Cermin Sejarah
Orde Lama dan
Orde Baru

JOSEPH STIGLITZ

Trump: Perang Tarif,
Persaingan
AS vs Tiongkok

A. SUDIARJA

Humanisme -
Antihumanisme:
(masih) Adakah
Manusia?

SINDHUNATA

Cogito Ergo Sum:
René Descartes dan
Kebahagiaan yang
Berakal

SERI KALABENDU, 2012
karya HARI BUDIONO

Rp35.000,00

DUA BULANAN, NOMOR 03 - 04, TAHUN KE-74, 2025

JURNALISME SERIBU MATA

BASIS

menembus fakta

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.

Jo Ditjen PPG

Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996

Penerbit

Yayasan BP Basis

Anggota SPS ISSN: 0005-6138

Penasihat

Franz Magnis-Suseno

Pemimpin Umum

Sindhunata

Pemimpin Redaksi

A. Setyo Wibowo

Wakil Pemimpin Redaksi

A. Sudiarja

Dewan Redaksi

B. Hari Juliawan

Heru Prakosa

A. Bagus Laksana

Klaus Heinrich Raditio

Redaktur Pelaksana

C. Bayu Risanto

Redaktur

Dian Vita Ellyati

Francisca Purnawijayanti

Redaktur Artistik

Hari Budiono

Sekretaris Redaksi

Anang Pramuriyanto

Promosi/ Iklan

Slamet Riyadi, A. Yulianto

Willy Putranta

Administrasi/ Distribusi

Francisca Triharyani

Keuangan

Widarti

Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta

Telepon: 081225225423, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:

basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: majalahbasis@gmail.com

Rekening:

BCA No. 1263333300 a.n. Yay Basis,

BRI No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

BNI No. 1952000512 a.n. Bpk Sindhunata

TANDA TANDA ZAMAN /

A. Setyo Wibowo

Habis Demokrasi, Terbit Timokrasi ... 2

KACABENGKALA / A. Sudiarja

Humanisme - Antihumanisme:

(Masih) Adakah Manusia? ... 17

FILSAFAT / Sindhunata

Cogito Ergo Sum: René Descartes
dan Kebahagiaan yang Berakal ... 24

FILSAFAT / Sindhunata

Cara Kerja Descartes ... 38

EKONOMI / Antonius Sumarwan

Donald Trump: Perang Tarif dan Persaingan

Amerika Serikat vs Tiongkok ... 42

SOSIAL / Setyaningsih

Anak Bapak Tidak Suka Membaca ... 51

SENI / Asvi Warman Adam

Edhi Sunarso: Cermin Sejarah

Orde Lama & Orde Baru ... 54

PULISI / Badrul Munir Chair

Sebelum Mati, Ia Berbisik: *Amor Fati* ... 60

Peristiwa Kecil Perkabungan ... 61

SENILUKIS / Hari Budiono

Kalabendu ... 62

CERPEN / Lukas Deni Setiawan

Pelataran ... 63



Habis Demokrasi, Terbit Timokrasi

A. SETYO WIBOWO

Pencapaian Reformasi 1998 rontok satu per satu. Sepuluh tahun terakhir KKN berjaya.

Korupsi menggila, *Kolusi* di mana-mana, *Nepotisme* meruyak dari Wakil Presiden, kementerian-kementerian sampai desa-desa. Pemilu memang berjalan, namun hukum sebagai landasan bernegara dirontokkan menjadi legalisme otokratis.

Saat hukum sekadar formalitas, apakah kita menuju timokrasi (militarisme)? Berasal dari bahasa Yunani *time* (honor, kehormatan) dan *kratia* (power, kekuasaan), timokrasi berarti kekuasaan atas dasar kehormatan harga diri.

Kata-kata merendahkan

Kagetkah kita saat mendengar Presiden bercanda “*Ndasmu*”? Tiga kali kata ini keluar dari mulutnya. Pertama, pascadebat capres dengan Anies Baswedan (12/12/2023), di acara internal Gerindra, Prabowo berseloroh, “Etik, etik, etik. *Ndasmu* etik.”¹ Kedua, saat Kongres ke-6 PAN, 24/8/2024, kata “*ndasmu*” kembali keluar.² Ketiga, saat HUT ke-17 Gerindra, di Sentul 15 Februari 2025, Prabowo mengeluarkan mantra favoritnya: “Ada orang-orang pintar (berkata) ‘kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar’. *Ndasmu*.”³

Katanya, “*ndasmu*” hanyalah candaan akrab orang Banyumasan. Namun, kali lain, di Batang (20/03/2025), di depan khalayak ramai, Presiden menyebut kritik dan suara miring sebagai “anjing menggonggong”.⁴ Dengan data terakhir, kelihatan bahwa “*ndasmu*” berkorelasi dengan “anjing”. Candaannya tidak lucu, cenderung meremehkan dan merendahkan orang lain. Inikah ciri rezim yang disetir oleh harga diri? Pada HUT ke-17 Gerindra, selain omong “*ndasmu*”, Prabowo berteriak kengang, “Hidup Jokowi!”⁵ Apakah orang yang *gengsian* memang begitu? Ia meremehkan kaum budak, tetapi ia sendiri membudak kepada orang yang ia anggap berkuasa dan berjasa menjadikannya presiden?

Belum ada enam bulan pemerintahan ini berkuasa, sopan santun hilang dari lanskap perpolitikan Indonesia. Cara bertutur Presiden menjadi norma baru bagi anak buahnya. Pada 17 Januari 2025, Deddy Corbuzier memaki kasar keluhan anak kecil tentang menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menganggap anak itu perlu bersyukur karena diberi makanan secara cuma-cuma. “Kurang enak kepala *lu pe’u*”, katanya.⁶ Setelah viral dengan sumpah serapahnya, tak ada sebulan, tanggal 11 Februari 2025, Deddy diangkat menjadi Staf Khusus Menteri Pertahanan.⁷ Rupanya, serapah “kepala *lu pe’u*” menjadi tiket untuk naik jabatan. Menghina anak kecil “*ndasmu peyang*, lonjong, makanya bodoh” adalah wujud loyalitas tanpa batas pada *boss*.

Saat wartawan sinar Bocor Alus Politik *Tempo* dikirim potongan kepala babi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menanggapi sambil lalu, “Ya dimasak saja.”⁸ Ketua Kelompok Fraksi (Kapaksi)

Gerindra di Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul, dalam keterangan resminya untuk menanggapi pengiriman kepala babi dan bangkai enam tikus terpenggal, Senin 24 Maret 2025, membuat pernyataan ajaib: itu bukan teror.⁹ “Secara hukum, belum dapat dikatakan sebagai bentuk teror kepada jurnalis karena belum ada putusan pengadilan yang sah terkait siapa pelakunya. Kita perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah.” Luar biasa, saat rumah kita dilempari tanah kuburan saja kita sudah ketakutan,¹⁰ pengiriman bangkai enam tikus yang dipenggal kepada jurnalis malah dianggap enteng. Kalau nanti kirimannya paket bom, apakah itu juga bukan teror karena belum ada putusan pengadilan mengenai pelakunya?

Ketika IHSG merosot berkali-kali pada pertengahan Maret 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi dengan komentar cemplang, “Ekonomi RI lebih hebat dari Timor Leste.”¹¹ Jawaban Mendagri hanya melanjutkan jawaban ganjil Prabowo saat dikritik soal kabinet gemuk. Pada Februari 2025, Prabowo menyebut contoh Timor Leste yang penduduknya sedikit, tetapi memiliki 28 menteri.¹² Akhirnya, meski masih ada banyak lagi, omongan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sama saja. Saat merespons kritik terkait kondisi negara yang semakin sulit, yang disuarakan lewat tagar #IndonesiaGelap, ia menukas, “Kau yang gelap!”¹³

Menarik menyimak kata-kata Hannah Arendt: orang berkecenderungan totaliter mengganti semua profesional yang penuh bakat dengan orang-orang gila dan bodoh. Bagi orang totaliter, tiadanya kecerdasan dan kreativitas adalah jaminan bahwa mereka akan loyal kepadanya (Na'im. 2022: 93).

Korupsi dipelihara

Sopan santun sudah menguap. Demikian juga dengan janji pemberantasan korupsi. Katanya hendak mengejar koruptor sampai Antartika, nyatanya malah mau memaafkan, memberi kesempatan tobat. “Saya Minggu ini dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah mencuri, kalau kembalikan yang kau curi akan saya maafkan,” kata Prabowo saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu, 18 Desember 2024.¹⁴

Mungkin ini yang menjelaskan mengapa sepanjang Januari-Maret 2025 muncul orkes kasus korupsi yang timbul menggelegar lalu hilang lenyap dalam senyap,

mulai dari pagar laut PIK 2, korupsi Pertamina, korupsi Antam, korupsi Minyak Kita, korupsi PLN, hingga elpiji melon yang mendadak langka. Dalam istilah anak-anak ormas kemahasiswaan, kasus-kasus korupsi ini “dikelola” dengan *ciamik*: dimunculkan bukan untuk diberantas, tetapi sekadar untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tak terpikirkan oleh otak yang waras. Maksudnya, ya, ganti pemain saja. Korupsinya, *mah*, jalan terus.

Undang-undang jadi formalitas

Bukannya secepat-cepatnya mengesahkan UU Perampasan Aset untuk membasmi korupsi, mendadak Revisi atas UU TNI dibahas secara kilat, melanggar aturan DPR sendiri tentang pembuatan Prolegnas. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama, pengajuan RUU TNI sebagai prioritas Prolegnas 2025 dilakukan secara tidak sah.¹⁵

Cara melegalkan perluasan militer ke ranah sipil dilakukan mirip pembuatan UU pada era Jokowi, yaitu dilakukan dengan cara tergesa-gesa. “Pengesahan UU revisi UU TNI menderita ‘penyakit’ yang sama dengan pengesahan UU IKN dan UU Omnibus Cipta Kerja. Semuanya tertutup, tergesa-gesa, dan tidak memperhatikan aspirasi warga. Singkatnya, DPR gagal menjadi wakil rakyat yang semestinya mendahulukan kepentingan publik untuk tahu apa dampak UU yang akan mereka saahkan” (Nugroho. *Kompas*, 26/03/2025: 6).

Revisi UU TNI diloloskan oleh DPR pada Kamis, 20 Maret 2025. Utut Adianto (politisi PDIP, Ketua Komisi I DPR) menyerahkan UU yang disahkan itu kepada Puan Maharani (Ketua DPR, politisi PDIP). Ironis, PDIP menjadi garda terdepan supaya militer lebih leluasa masuk ke ranah sipil: meluasnya definisi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (dari 14 ke 16 hal) dan melebarnya jabatan sipil yang bisa diduduki militer (dari 10 menjadi 14 Kementerian dan lembaga).¹⁶ Betulkah militerisme bertakhta kembali? Yang jelas, UU ini melegitimasi multifungsionalisme militer yang telah dipraktikkan pada era Jokowi. Ingat, tahun 2023 pada era Jokowi, 2.569 prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil. Sebanyak 19 perwira aktif menduduki jabatan sipil di luar lembaga yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁷

Sekali lagi, ironisnya, UU ini lolos berkat peran utama PDIP (Utut Adianto dan Puan Maharani). Tentu, semua wakil rakyat di DPR yang kita pilih kemarin adalah yang paling bertanggung jawab atas UU TNI ini.

Namun, sungguh kentara peran besar PDIP meloloskan UU yang dikritik oleh masyarakat sipil. “Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) mengalami perubahan. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dulu tegas menolak revisi ini dengan alasan berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI. Namun PDIP kini justru ikut dalam pembahasan revisi tersebut di DPR dan menyatakan dukungannya.”¹⁸

Saat UU TNI didemo mahasiswa, Puan Maharani meminta para mahasiswa membaca dulu UU TNI.¹⁹ Kalau saya jadi mahasiswa, pasti akan bertanya balik, “*Emangnya* Ibu Puan sudah baca juga?” Jangan-jangan karena sudah sedemikian nyaman di menara kekuasaan, Puan Maharani tidak paham lagi otak dan otot adik-adik mahasiswa.

Di sebuah video, Adian Napitulu, politisi PDIP mencoba membela partainya. Kata Adian, PDIP sudah berjuang maksimal sehingga frasa: “... dan kementerian/ lembaga lain sesuai pertimbangan presiden” bisa dihapus. Semoga saja benar kata Adian ini. Tapi bagaimana dengan frasa lain soal OMSP yang sama saja memberi peluang pada militer untuk sebesar-besarnya masuk ke ranah sipil? Mengapa Adian diam soal itu?

Analisis Yanuar Nugroho lebih meyakinkan. Ia menengangi revisi UU TNI (utamanya pasal 7) tentang perluasan OMSP berpotensi menjadi “pasal karet” karena kini secara legal OMSP hanya diatur melalui peraturan presiden. Artinya, apa pun yang dipandang presiden layak dijadikan OMSP akan membuka pintu bagi TNI aktif untuk terlibat dalam urusan sipil” (Nugroho. *ibid.*).

Sebelumnya, di antara kaum sipil, hanya ormas-ormas yang suka petentengan berseragam loreng. Sekarang, para menteri dan kepala-kepala daerah pamer bangga dengan seragam lorengnya. Setelah retreat Kabinet Merah Putih (24-27 Oktober 2025), Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan: “Mudah-mudahan yang akan saya terapkan di kementerian saya nanti bahwa pemimpin akan sama-sama jadi kita hadapi segala tantangan sama-sama tapi anak buah juga harus ikut sama-sama, harus disiplin supaya kita bisa mencapai target-target yang kita inginkan di kementerian kita masing-masing”.²⁰ Pada tanggal 21-18 Februari 2025, ratusan kepala daerah juga retreat di Akmil Magelang.²¹ Foto-foto mereka berseragam militer tampak meriah penuh kegembiraan.

Jadi, kagetkah kita saat mahasiswa maraton melakukan demo penolakan UU TNI dari pertengahan hingga

25 Maret 2025 (total di 40-an kota: Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Majalengka, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lumajang, Palangka Raya, Banjarmasin, Denpasar, Kupang, Makassar, Manado, Ambon, Manokwari, dan lain-lain,²² tanggapan pemerintah: itu kerjaan para *buzzer* atau pendengung? Menteri HAM, Natalius Pigai, tanggal 19 Maret 2025 mengatakan bahwa para penolak UU TNI ini adalah orang “enggak ada kerjaan dan *buzzer* belaka”.²³

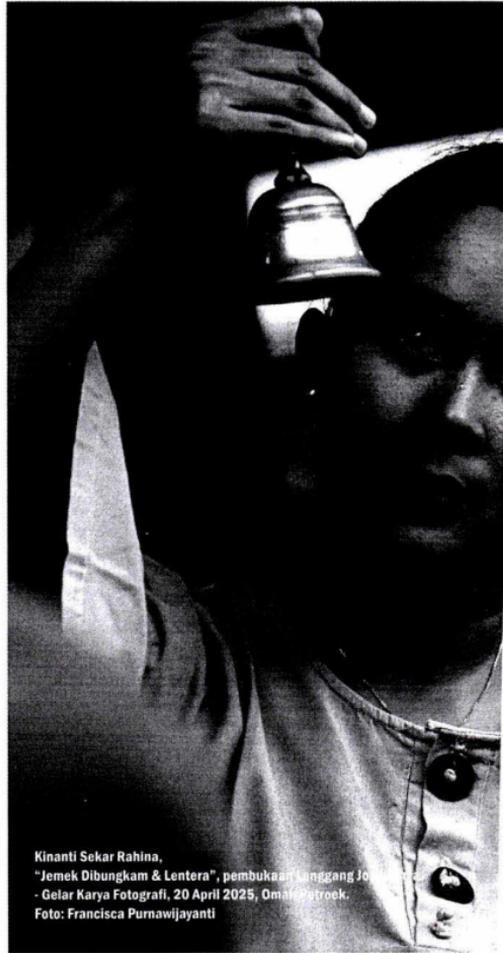
Lebih ngeri lagi, demo-demo ini katanya dibiayai asing! Diinisiasi oleh Prabowo sendiri, narasi antek asing makin jamak. “Kelompok masyarakat sipil yang menerobos rapat tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu, 15 Maret 2025, dicap sebagai antek asing oleh ratusan akun di Facebook dan Instagram. Di antaranya, akun @kesdam_gudayana, @jaya_polisi_militer, dan @yonif741gn.”²⁴ Bukannya sadar diri bahwa pemerintah hobinya utang ke asing, bukannya ingat bahwa Danantara pun menghiasi diri dengan nama-nama asing (ada Ray Dalio, Jeffrey Sachs, dan Chapman Taylor), bukannya berkaca bahwa *buzzer* bangga saat presidennya casciscus berbahasa asing, ini malah teriak-teriak “asing”.

Demokrasi habis

Kisah-kisah di atas adalah dampak yang mulai kita rasakan akibat mundurnya demokrasi. Di satu sisi, pada tahun 2024 pemilu dan pilkada sudah berjalan baik, prosedur demokrasi sudah dijalankan. Tapi di sisi lain, harus diakui bahwa pemilu ini hanyalah prosedural, basa-basi belaka, karena semua sudah diselesaikan di bawah meja sebelum pemilu berlangsung. Ini bukan hanya di Indonesia, tren global menunjukkan mundurnya demokrasi di mana-mana.

Saat bersaksi di Mahkamah Konstitusi, dipanggil sebagai saksi ahli etika mengenai prinsip-prinsip dasar bernegara pada tanggal 2 April 2024, Romo Magnis menyebut, “Presiden yang menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan beberapa pihak sama seperti mafia”.²⁵

Sebutan mafia ini mengingatkan saya pada tulisan Moisés Naím dalam bukunya *The Revenge of Power* tentang upaya kaum autokrat di negara-negara demokrasi yang beroperasi mirip kartel. Maksudnya? Mirip pemimpin kartel (mafia narkoba di Amerika Selatan), kaum autokrat di negara demokrasi menggunakan semua perangkat negara, seperti polisi, tentara, media, PNS, para regulator (KPU, Bawaslu),



Kinanti Sekar Rahina,
“Jemek Dibungkam & Lentera”, pembukaan Langgeng Jo
- Gelar Karya Fotografi, 20 April 2025, Omah Petreok.
Foto: Francisca Purnawijayanti

serta hakim-hakim, untuk kepentingannya pribadi, bukan untuk kepentingan negara. Tujuannya apa? Mencurangi aturan main dengan kasatmata supaya kekuasaannya bisa dipertahankan. Bila bisnis yang normal menerima adanya persaingan yang sehat, maka bisnis kartel adalah contoh ultima bagaimana monopoli dijalankan. Dalam bahasa bisnis, para autokrat mempraktikkan monopoli bisnis (Naím. 2022: 207).

“

Akibatnya, secara umum kita melihat bagaimana pejabat politik dan bohir berkolusi mengekalkan kekuasaan dengan basis uang. Ini semua mirip dengan modus operandi sebuah kartel.

mengekalkan kekuasaan dengan basis uang. Ini semua mirip dengan modus operandi sebuah kartel.

Menurut Moisés Naim, demokrasi saat ini dibusukkan oleh pemecahbelahan rakyat (polarisasi) akibat model politik populis, yaitu model politik yang sebenarnya tanpa ideologi karena intinya hanyalah menggaet suara rakyat memakai model populis “*us versus them*”, *bucin* Jokowi versus pengkritik Jokowi, atau model politik meniru dunia *fandom* (e.g. apakah kamu tim bubur *pake* diaduk atau tanpa diaduk), di mana masing-masing pihak percaya pada kebenarannya masing-masing (*post-truth*) yang hari-hari ini difasilitasi oleh algoritma medsos. *Post-truth* (pascakebenaran) resmi menjadi *word of the year* pada tahun 2016. *Post-truth* menggambarkan situasi ketika kebenaran dianggap tidak relevan lagi. Kebenaran dalam arti faktual dianggap tidak relevan. Pada era *post-truth*, orang memeluk kebenaran berdasarkan preferensi emosional, bukan pertimbangan rasional. Apa pun argumen yang diberikan, orang yang *bucin* pada Jokowi atau Prabowo akan memegang keyakinannya bahwa mereka adalah sang kebenaran. Ini terjadi bukan karena kaum *bucin* itu rendah moralnya. Bukan. Ini akibat modus pengaburan fakta yang saat ini menjadi salah satu fitur infrastruktur politik (Naim, 2022: 165).

Menurutnya, apa yang kita alami di Indonesia mirip dengan penyakit yang menggerogoti demokrasi di seluruh dunia. Dalam bukunya, *The Revenge of Power*, ia menawarkan “3P” sebagai basis analisis situasi demokrasi di seluruh dunia yang sedang memburuk: polarisasi, populisme, dan pascakebenaran.

Judul *The Revenge of Power* saya artikan “balas dendam kekuasaan”. Maksudnya? Kekuasaan sudah ada sejak manusia ada. Kita tahu, pada era Yunani, Romawi, dan Abad Pertengahan, kekuasaan ada di tangan raja dan kaisar dengan dinastinya atau orang-orang kuat bertangan besi. Pada era itu, orang yang memegang kekuasaan melakukan apa pun yang ia sukai atas nama kekuasaan. Nah, sejak Revolusi Prancis, kekuasaan tiba-tiba diberangus. Rakyat mengambil alih kekuasaan dan memutuskan demokrasi sebagai alat pembatasan kekuasaan. Ada *checks and balances* dengan tiga institusi terpisah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada pembatasan kekuasaan, yaitu masa jabatan hanya satu atau dua periode.

Lumayan lama demokrasi mengerang kekuasaan, sejak Revolusi Prancis sampai kemenangan Demokrasi Liberal atas Uni Soviet pada tahun 1991.

Selepas pemilu kemarin, semua orang merasa bahwa hukum di Indonesia gampang diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan politik. Nyaris semua caleg, baik yang lolos maupun yang tidak lolos, bercerita bahwa politik uang di Pemilu 2024 adalah yang paling brutal. Semua caleg yang saya kenal bercerita bahwa politik uang harus ia lakukan. Suka tak suka. Akibatnya, secara umum kita melihat bagaimana pejabat politik dan bohir berkolusi

Namun, mulai 1990-an, di negara-negara demokratis, muncul figur-figur populis yang aneh-aneh. Dan puncaknya pada tahun 2010 ke atas, demokrasi melemah di negara-negara yang secara tradisional demokratis, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Italia. Negara-negara muda dalam demokrasi seperti India, Indonesia, Filipina, Hungaria, dan Brazil makin lesu darah. Kekuasaan yang intinya “ingin mengekalkan dirinya sendiri” saat ini memukul balik dan melumpuhkan demokrasi.

Menurut studi tahun 2020 di *Columbia Law Review* yang ditulis oleh Mila Versteeg, Tim Horley, dan Anne Meng, sejak tahun 2020 banyak presiden berusaha mengutak-atik batas jabatannya. Hampir sepertiga presiden dari negara-negara demokratis berupaya tinggal lebih lama melampaui batas jabatannya. Dari jumlah itu, sepertiganya berhasil memperpanjang kekuasaannya (Na'im, 2022: 30-32).

Info bahwa Presiden Jokowi ingin *overstay* dalam kekuasaan (lewat usulan tiga periode, usulan perpanjangan kekuasaan karena Covid, dan akhirnya tercapai lewat anaknya—Gibran—yang menjadi Wakil Presiden Prabowo) ternyata bukan anomali. Saat ini, kita sedang mengalami gejala kekuasaan yang sedang membalas dendam kepada demokrasi. Kekuasaan ingin menampilkan wajah lamanya, yaitu berkuasa selama-lamanya.

Bagaimana kekuasaan membalas dendam? Menurut Na'im, lewat 3P. Pertama—tama harus dipahami bahwa “balas dendam kekuasaan lewat 3P” hanya terjadi di negara demokrasi, bukan dalam negara autokrasi. Kita ingat bahwa di negara seperti Korea Utara, Cina, atau Singapura, 3P tidak terjadi. Mengapa? Alasannya sederhana, karena negara-negara tersebut adalah negara otoriter, di mana kekuasaan ada di tangan segelintir orang atau partai. Di Singapura atau Cina, kalau Anda macam-macam, nasib Anda *kelar*. Polarisasi tidak akan pernah terjadi karena rezim otoriter segera membarangnya dengan cepat. Populisme dan *post-truth* juga tidak akan muncul karena semua dikontrol ketat oleh sang autokrat.

Itu sebabnya 3P hanya bisa terjadi di negara-negara demokratis. Supaya 3P mulus berjalan di dalam demokrasi, mengingat demokrasi adalah rezim yang didasarkan pada hukum, maka 3P tampak dalam gejala legalisme autokratis. Disebut “legalisme” karena masih memakai hukum, tapi, ya, hanya seolah-olah legal. Sedangkan autokratisme berasal dari *autos* (diri

sendiri) dan *kratos* (kekuasaan). Artinya, kekuasaan yang legitimasinya dari diri si penguasa sendiri. Jadi, saat ini dua pilar pokok demokrasi, yaitu pemilu secara reguler dan konstitusi ber-HAM tetap berjalan, tetapi berjalan dengan aneh, mengikuti selera si penguasa. Hukum diutak-atik sedemikian rupa. Terhadap lawan, hukum ditegakkan secara ketat, tapi untuk teman sendiri hukum diterapkan dengan fleksibel (Na'im, 2022: 26). Hukum tidak lagi imparial karena dijalankan dengan tebang pilih.

Lewat demokrasi prosedural di mana seolah-olah semuanya tampak legal, demokrasi ditelikung lewat *pseudolaw*, sebuah praktik hukum yang tak lain adalah *autocratic legalism*. Mengapa hukum menjadi palsu (*pseudolaw*)? Ada dua penjelasan: pertama, hukum sekadar justifikasi untuk praktik lancung yang sudah dan akan terjadi. Kedua, alih-alih memberi kepastian, hukum dibuat agar orang pusing dengan aneka ragam hukum yang sering tak konsisten sehingga orang bingung aturan mana yang mesti diikuti. Saat orang bingung, maka si autokrat maju terus dengan tenang menjalankan agendanya sendiri (Na'im, 2022: 29).

Menurut Na'im, di banyak negara demokratis, para presiden menggunakan ragam taktik untuk membuat hukum menjadi sekadar alat yang melayani kepentingan sendiri. Sekarang kita sadar, pada era Jokowi, revisi UU KPK akhirnya menjadikan KPK alat Presiden untuk menyandera lawan-lawan politiknya. Penunjukan Anwar Usman, adik ipar Presiden, menjadi Ketua MK berujung pada munculnya keputusan kontroversial (MK No. 90/PUU-XXI/2023) yang menjadi jalan sang keponakan (Gibran) terpilih menjadi wapres, penggunaan dana bansos ratusan triliun lewat UU zaman Covid sehingga anggaran bisa dialih-alihkan, dengan satu tujuan: memenangkan ambisi berkuasa.²⁶

Contoh presiden dalam sebuah sistem demokrasi yang mengekalkan dirinya lewat utak-atik konstitusi adalah Vladimir Putin (Na'im, 2022: 30). Putin yang berusia 71 tahun terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2024 dan akan menjabat sampai 2030. Padahal, ia sudah berkuasa sangat lama. “Putin telah menjadi pemimpin Rusia sejak 1999. Kala itu, ia dilantik sebagai pelaksana jabatan Presiden Rusia karena mundurnya Boris Yeltsin. Ia lalu dilantik sebagai Presiden Rusia secara resmi tahun 2000 untuk masa jabatan pertama setelah resmi memenangkan pemilu. Pada 2008 dan 2012, ia menjadi Perdana Menteri Rusia dengan kendali penuh. Pada 2018, Putin kembali menjadi Presiden

“

Berlusconi berhasil men-*downgrade* wacana politik sedemikian rupa sehingga orang menjadi apatis dengan politik. Lewat satire dan hiburan seksy, ia berhasil membodohkan orang Italia sehingga cara berpikirnya menjadi simpel. Orang bodoh mudah menjadi korban retorika populis.

Rusia. Kala itu, ia memenangkan pemilu dengan 76% suara. Pada 2020, konstitusi yang hanya mengizinkan seorang presiden untuk menjabat dua periode berturut-turut diubah. Putin diyakini akan tetap berkuasa hingga tahun 2036”.²⁷

Pembodohan rakyat

Sering orang mengatakan bahwa budaya demokrasi yang kokoh tidak akan mudah digoyang. Akar demokrasi yang adalah “kesetaraan di depan hukum”—dari tradisi Yunani—telah menancap dalam di Eropa. Tetapi, bagaimana ceritanya bahwa Italia, misalnya, akhirnya bisa ditekuk oleh seorang autokrat seperti Berlusconi? Saat ini, lewat 3P, rezim yang berkuasa di Italia adalah partai politik ekstrem kanan di bawah PM Giorgia Meloni yang anti-imigran. Di negeri yang pernah diperintah oleh Benito Mussolini, bagaimana mungkin sebuah partai ekstrem kanan bisa menang pemilu?²⁸

Awalnya bisa ditemukan pada tahun 1990-an. Moisés Naím menceritakan secara menarik bagaimana Italia jatuh dalam populisme Berlusconi pada tahun 1990-an. Politik Italia memang agak kacau, utamanya setelah gerakan *Mani Pulite (Tangan-Tangan Bersih)*, banyak elite parpol yang masuk penjara. Di tengah kekosongan politisi, Berlusconi pada tahun '90-an membangun kanal-kanal televisi swasta (*Mediaset*), membangun AC Milan menjadi klub raksasa di Italia. Siapa pun yang pada tahun '90-an mengalami masa remaja, pasti tak akan lupa dengan Van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard, dewa-dewa *calcio* yang tiap malam minggu ditonton seluruh rakyat Indonesia. Berlusconi memberi hiburan masif di kanal televisinya lewat telenovela dari Amerika Serikat dan Amerika Latin. Salah satu program acara satire politik yang terkenal adalah *Striscia la Notizia*. Banyak sekali orang menonton ini: dua presenter pria melucu-lucukan para politisi, ditengahi dengan tarian dua perempuan seksy di atas meja presenter. Acara hanya 15 menit, sebuah hiburan segar karena lucu dan karena tarian dua wanita tersebut.

Rupanya, setelah beberapa tahun mencuci otak orang Italia dengan cara demikian, pada tahun 1994 Berlusconi maju pemilu, ia terpilih sebagai perdana menteri. Berlusconi berhasil men-*downgrade* wacana politik sedemikian rupa sehingga orang menjadi apatis dengan politik. Lewat satire dan hiburan seksy, ia berhasil membodohkan orang Italia sehingga cara berpikirnya menjadi simpel. Orang bodoh mudah menjadi korban retorika populis (Naím. 2022: 54).

“

Militerisme tidak cocok dengan demokrasi. Berdasarkan sejarah global pretorianisme, negara yang dibentuk, dijalankan, dan dipertahankan oleh tentara selalu berakhir buruk bagi masyarakat. Tentara dilatih untuk berkonflik, bahkan membunuh sesama manusia.

Bagi Moisés Naím, analisis atas cara Berlusconi naik ke kekuasaan pada pertengahan tahun 1990-an menjadi model bagaimana para tokoh populis mencapai kekuasaan pada dekade 2010-2020. Kehadiran internet dengan media sosialnya mempermudah pendangkalan otak manusia sehingga lebih mudah dimanipulasi. Saat ini, seseorang dipilih bukan karena suara rakyat, tetapi karena fanatisme fannya (Naím. 2022: 57).

Lewat operasi *buzzer* di medsos, rakyat dicekoki *post-truth* sehingga percaya begitu saja pada apa pun yang dikatakan penguasa. Fakta tidak lagi jelas karena *buzzer* rajin menyodorkan “fakta alternatif”. Mengutip Hannah Arendt, Moisés Naím mengatakan bahwa rakyat yang ideal bagi kokohnya sebuah rezim totaliter bukanlah kaum fanatik, semisal seorang Nazi atau komunis yang ideologis, bukan, melainkan rakyat yang sudah tidak bisa lagi membedakan fakta dari fiksi, dan tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan salah (Naím. 2022: 165).

Di Indonesia, saat IQ rata-rata rendah, literasi juga rendah. Dari budaya lisan, kita meloncat ke budaya *ngobrol* di medsos. Tingkat kelulusan perguruan tinggi rendah, dan level pendidikan juga tak pernah naik tingkat. Walhasil, 3P mendapatkan tanah yang subur untuk berkecambahnya legalisme autokratik.

Terbitnya timokrasi

Wujud kemunduran demokrasi saat ini tampak dalam gejala militerisme. Secara kasat mata, banyak sipil suka berpakaian ala-ala militer. Kecenderungan ini memuncak saat para menteri dan kepala daerah juga bangga berseragam militer. Jadi, di luar aspek teknis soal pelolosan UU TNI, masyarakat paham bahwa ini semua ada hubungannya dengan Presiden Prabowo yang adalah seorang bekas militer. Lewat tangan-tangannya yang kuat di DPR, UU TNI cepat-cepat diloloskan, untuk sebuah maksud yang kita sendiri tidak tahu.

Kata-kata tak sopan karena enggan mendengar opini berbeda, auman lirih meminta koruptor bertobat, pembuatan UU tanpa urgensi meski ada yang lebih sangat urgen seperti UU Perampasan Aset dan penanganan situasi ekonomi yang acakadut, dan lumpuhnya badan legislatif (DPR), yudikatif (Kejagung, KPK), serta media *mainstream* menyadarkan kita bahwa demokrasi sedang terbenam di Indonesia. Gejala militerisme mulai terbit.

Setelah Revisi atas UU TNI, ke depan, beragam kebijakan dan rencana revisi UU, sejenisnya (Kepolisian, Kejaksaan, KUHAP, dan revisi UU Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan) bukan hanya akan mematikan Reformasi 1998 melainkan juga demokrasi. “Bangsa ini akan terpuruk dan sangat mungkin menjadi negara gagal” (Nugroho. Ibidem).

Militerisme tidak cocok dengan demokrasi. Berdasarkan sejarah global pretorianisme, negara yang dibentuk, dijalankan, dan dipertahankan oleh tentara selalu berakhir buruk bagi masyarakat. Tentara dilatih untuk berkonflik, bahkan membunuh sesama manusia. Keahlian itu pula membuat militer tidak kompatibel dalam pengelolaan masyarakat sipil. Cara militer membentuk diri adalah dengan tidak memberi ruang pada perbedaan pendapat dan diskusi. Budaya ini bakal terbawa dan diterapkan ketika militer masuk ke dalam pemerintahan sipil. Ini yang menciptakan otoritarianisme. Korupsi itu konsekuensi logis dari ketiadaan oposisi. (*Kompas*, 24/03/2025: 4).

Psiko-politik Platon

Bagi Platon (filsuf Yunani dari abad ke-5 SM) rezim militeristik namanya adalah timokrasi. Dalam kajian psiko-politik, mengaitkan politik dengan analisis tentang jiwa (*psukhe*), saat bagian jiwa bernama *thumos* merajalela, penguasanya dipenuhi hasrat akan kehormatan dan gengsi diri. Penguasa ini menjadi *philotimos* (gila hormat), *philonikos* (edan, ingin selalu menang), dan *philarkhos* (gila jabatan) (Bdk. Platon. *Politeia* atau *The Republic*: 549a–b).

Psikologi Platon membedakan tiga fungsi jiwa dalam diri manusia. Fungsi pertama, adalah *logistikon* (rasio), yang terletak di kepala. Bagi Platon, rasio harus mengendalikan dua fungsi jiwa lainnya, yaitu *thumos* dan *epithumia*. Fungsi kedua, bernama *thumos* terletak di bagian toraks (dada), di antara leher dan diafragma dada. *Thumos* berkenaan dengan nafsu akan harga diri, semacam emosi di dada. Unsur *thumos* merujuk pada segala bentuk afektivitas, rasa semangat, dan agresivitas. *Thumos* adalah tempat keberanian muncul. Dalam *The Republic* 604e–605a, Platon menjelaskan bahwa *thumos* inilah yang merangsang jiwa manusia saat melihat pertunjukan tragedi untuk memberontak (*aganaktein*) dan tidak menyerah begitu saja pada takdir (*dike*) yang mempermainkan nasib manusia. Fungsi ketiga, bernama *epithumia* ditemukan di bagian perut ke bawah, yaitu bagian yang mengatur nafsu makan, minum, dan seks, atau nafsu akan uang. Secara etimologis, *epi-thumos* berarti “sekitar, pinggiran” *thumos*. Baik *epithumia* maupun *thumos* disebut sebagai bagian jiwa yang irasional.

Thumos, jiwa yang terletak di dada, senang mencari kemenangan dalam kompetisi dan sibuk mencari penghargaan di mata orang lain. Dimensi ini dikatakan bersifat irasional dengan alasan yang sederhana bahwa sering kali demi harga diri dan bangga diri, orang meninggalkan pertimbangan-pertimbangan rasional. *Thumos* adalah hasrat yang cenderung baik dan mudah diarahkan oleh akal. Namun, saat mengikuti dirinya sendiri, *thumos* bisa sangat tidak rasional. Itu maknanya, *thumos* kadang juga disimbolkan sebagai binatang buas singa (*Politeia*: 588c–d, bdk. Wibowo. 2010: 47–50).

Supaya manusia sukses, jiwanya mesti rasional. Artinya, *logistikon* mesti mengendalikan dua bagian lainnya. Rasio mesti memberi batasan-batasan rasional pada ambisi harga diri (*thumos*) dan pada keserakahan akan uang (*epithumia*).

Dalam kehidupan sosial politik (hidup di *polis*), *epithumia* digambarkan sebagai kelas petani dan pedagang yang orientasinya mencari profit. *Thumos* digambarkan sebagai prajurit. Rasio adalah para filsuf-raja. Sama sebagaimana individu manusia akan sukses kalau ia hidup rasional, maka *polis* akan adil kalau filsuf memimpin kaum tentara dan pedagang.

Lahirnya timokrat

Dalam *The Republic*, Platon mengisahkan bahwa sebagai-bagusnya rezim aristokrasi filsuf raja, *toth*, rezim ini akan merosot. Aristokrasi berubah menjadi rezim militeristik, namanya timokrasi, lalu merosot menjadi rezim pencari uang (oligarki), dan akhirnya menjadi rezim anarkis (demokrasi), yang ujung akhirnya adalah tirani. Kalau rezim adil hanyalah aristokrasi, maka jenis rezim–rezim lainnya adalah tidak adil (*Politeia*: 543–570, bdk. Wibowo. 2017: 188).

Timokrasi merupakan campuran aristokrasi dan demokrasi. Di satu sisi, rezim militer timokrasi muncul sebagai turunan langsung dari kaum aristokrat atau kaum filsuf raja yang adalah kaum aristokrat pengetahuan dan keutamaan. Di sisi lain, keinginan mengakumulasi harta kekayaan mulai bersemi di dalam diri timokrat. Itu maknanya, timokrasi kemudian memperanakan kaum demokrat yang obsesi hidupnya mengikuti nafsu uang seliar-liarnya. Secara publik, seorang timokrat berkhobtah tentang pentingnya membela negara, tentang kebesaran nama bangsa, namun secara privat, hasratnya diperbudak oleh keinginan akan uang yang secara diam–diam ia kumpulkan. Seorang timokrat

sudah mulai diperbudak oleh *epithumia*-nya (Wibowo, 2017: 29).

Platon menggambarkan kaum timokrat seperti ini: “[kaum timokrat] menyembunyikan cintanya pada emas dan perak di balik layar, mereka memiliki gudang dan ruang rahasia untuk menyembunyikannya, mereka membangun tembok di sekeliling rumahnya, mirip sarang hangat yang *private*, untuk pesta pora dengan perempuan atau siapa pun yang ia ingini [...] Tapi ia [si timokrat] ini pelit dengan uang, di satu sisi memuja uang, namun, di sisi lain menyembunyikan hartanya pribadi, sehingga karena dorongan nafsunya, akhirnya ia akan membelanjakan duit orang lain [uang negara]” (*The Republic*: 548a). Saat muda, sang timokrat masih suka berbicara tentang keutamaan dan heroisme, tetapi makin tua, makin kelihatan bahwa hobinya adalah menumpuk uang (*The Republic*: 549a).

Bagaimana asal-usul munculnya kaum timokrat? Platon menjelaskan bahwa karakter jiwa seorang timokrat muncul akibat tekanan langsung dari lingkungannya, entah ibunya, tetangganya, atau pembantu-pembantunya, yang membuat ia menjauh dari model aristokrasi ayahnya (Bdk. Leroux. 2002: 698, Catatan kaki no. 38). Dalam naskah lain, *Euthypron* 2d, Platon menjelaskan bahwa seorang manusia aristokrat percaya pada rasio sebagai yang terbaik untuk memerintah. Tetapi, karena terombang-ambing antara ayah dan ibunya, si timokrat muda mulai melepaskan prinsip rasio demi sebuah “prinsip-tengah” yang ia peluk (Leroux. 2002: 699). Di satu sisi, ia masih diwarnai darah aristokrat, tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang lain yang membuatnya berbeda.

Seorang timokrat masih ingat secara samar-samar bagaimana aura intelektual atau aura kenengratan ayahnya memesonanya banyak orang. Ia ingin memiliki aroma kebangsawanan seperti itu. Namun, karena kualitas dirinya tidak sebaik ayahnya, ia menerjemahkan aroma kebangsawanan sebagai status komandan untuk bisa menaklukkan prajurit-prajurit dan rakyat (pedagang dan kaum prodaktor) yang menjadi bawahannya. Kalau ayahnya sebagai intelektual tahu batas diri, maka sang timokrat mulai agresif menguasai bidang-bidang yang sebenarnya tidak ia pahami. Ia didera hasrat ingin mengontrol dan mendominasi demi menggelembungkan harga dirinya. Kalau aura kebangsawanan ayahnya membuat orang terpesona dan hormat dengan sendirinya, si timokrat hanya mendapatkan pesona lewat kontrol, paksaan, dan dominasi. Wataknya keras kepala.

Meski suka mendengarkan ceramah-ceramah yang *keren*, ia tak pintar membuat presentasi. Kepada para budak atau orang-orang di bawahnya, sikapnya brutal, tetapi kepada orang yang setara, ia jinak. Dan di depan seseorang yang berkuasa, si timokrat akan tunduk setunduk-tunduknya (deskripsi detail ini ada di *The Republic*: 548e-549a).

Bisa kita bayangkan hari-hari ini, seandainya ayahnya yang bangsawan membaca buku filsafat yang rumit, maka si timokrat anaknya sudah puas dengan memajang buku-buku *keren* di ruangnya dan tentu segala hal yang dia tafsir akan memberi aroma “wah” bagi dirinya. Pajangan buku tidak ada hubungannya dengan intelektualitas. Rezim militer—seperti Sparta (bdk. *Hippias maior*: 285b)—dikenal sebagai rezim yang anti-intelektual. Seorang timokrat lebih menghargai jabatan dan kemenangan daripada intelektualitas. Ia mengonsolidasikan kekuasaan dengan memobilisasi segala hal yang ia pikir bersangkutan paut dengan perang.

Dalam timokrasi, *polis* ditata seperti kondisi mau perang. Sang timokrat suka bicara soal “tipu muslihat dan strategi perang” sebagai hal paling urgent (*Politeia*: 547d-548a). Dalam bahasa sehari-hari, soal-soal seperti disiplin dan taat pada komando (loyalitas) menjadi “keutamaan” yang diprioritaskan. *Polis* diatur sedemikian rupa karena satu-satunya yang dianggap berharga oleh rezim timokrasi adalah cinta akan kemenangan (*philoniktia*) dan cinta akan kehormatan (*philotimia*) (*Politeia*: 548c). Tenaga, pikiran, dan segala sumber daya diarahkan ke situ. Mereka menjadi pencinta kekuasaan (*philoarchai*) dan pencinta kehormatan (*philotimos*) (*Politeia*: 548e-549a).

Disetir oleh *thumos*-nya, seorang timokrat memiliki semangat yang meledak-ledak penuh antusiasme (Leroux. 2002: 697-698). Ia berbeda dari ayahnya (aristokrasi) yang digambarkan sebagai orang yang sederhana, hidup apa adanya, bahkan cenderung asketik. Seorang timokrat masih mewarisi “kesederhanaan” itu, tetapi secara *katrok* atau kampungan. Bagi Platon, timokrasi mirip dengan Sparta, tetapi tidak seunggul Sparta. Mengapa? Karena kaum timokrat mulai cinta uang, dan dengan obsesinya pada harta benda, ia sudah tidak paham dengan arti kebudayaan yang sesungguhnya. Namun, kalau melihat sejarah yang sebenarnya, sebagaimana dilihat Aristoteles, Sparta akhirnya memang runtuh karena keserakahan akan uang (Leroux. 2002: 698). Saat para komandan hidup bermewah-mewah, sementara anak buah bergelimpangan mati di medan

“

Saat uang menjadi inti politik, dan para warga tentara Sparta tidak pernah memiliki hak untuk bertanya mengenai kebijakan para pemimpin mereka, maka jalan ke penyalahgunaan terbuka lebar.

laga, kata-kata seperti “disiplin dan loyalitas” menjadi tong kosong berbunyi nyaring.

Setelah mengalahkan Athena pada tahun 404 SM, pelan-pelan Sparta mengalami korupsi. Kemenangan atas Athena membuat Sparta kaya raya. Selain dari harta jarahan, mereka juga menerima pajak dari *polis-polis* yang tunduk kepada mereka (bdk. Lévy. 2003: 262-263). Berlimpahnya kekayaan membuat mereka serakah dan meninggalkan nilai-nilai moral tradisionalnya. Werner Jaeger menulis dengan tegas: “Uang, yang semula tidak dikenal di Sparta, mengalir masuk ke *polis*, sebuah orakel kuno yang ditemukan telah mengingatkan bahwa ketamakan, iya hanya ketamakan, yang akan menghancurkan Sparta” (Bdk. Jaeger. 1954: 81).

Akumulasi harta benda menciptakan kesenjangan yang memperlemah ikatan sosial (Lévy. 2003: 266). Makin banyaknya orang miskin di kalangan rakyat Sparta membuat mereka tidak bisa membayar iuran wajib untuk *syssition* (makan bersama) sehingga lama-kelamaan orang-orang miskin tidak dianggap sebagai warga negara. Konsekuensinya, jumlah resmi warga negara, dan dengan demikian tentara, berkurang drastis (Lévy, 2003: 269). Lebih dalam lagi, proses itu membuat ideal *homoioi* (kesetaraan) juga luntur.

Saat uang menjadi inti politik, dan para warga tentara Sparta tidak pernah memiliki hak untuk bertanya mengenai kebijakan para pemimpin mereka, maka jalan ke penyalahgunaan terbuka lebar. Pada abad keempat SM, ambisi machiavelik Raja Sparta membuat para prajurit sekadar menjadi alat bagi ketamakan mereka (Jaeger. 1954: 81). *Spirit* Sparta dimatikan justru oleh para pemimpinnya yang menyalahgunakan pasukannya demi ambisi-ambisi jangka pendek, seperti harta kekayaan. Ketika keteladanan pemimpin hilang, maka kohesi sosial pun luntur, masing-masing warga negara lantas memikirkan keselamatan diri sendiri tanpa peduli pada nasib negara.

Timbangan akhir

Menjaga rasa hormat, harga diri, bahkan berani mati deminya, tentu sangat penting pada saat genting semisal saat perang. Emosi besar di dada sangat dibutuhkan manakala taruhannya adalah hidup atau mati. Para pahlawan dihargai kehebatannya karena keberanian yang kadang mirip kenekatan. Namun, pada era damai dan tenang, kegilaan harga diri berubah menjadi sekadar *gengsi-gengsian* yang merepotkan. Tidak ada angin dan badai, tiba-tiba berseragam militer, berteatr hormat-

hormatan, dan main komando-komandoan. Sedemikian absurd situasi hari-hari ini sehingga Bareskrim pun hendak mengontrol pergerakan saham. “Kami dari Subdit 5 Dittipideksus Bareskrim Polri saat ini sedang memantau saham-saham. Sehingga, apakah saat ini saham ini sedang dalam kondisi baik-baik saja atau perlu mekanisme apa?” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema ‘Menakar Konsekuensi Inkonstitusional Bersyarat KUHD Pasal 251 bagi Industri Asuransi’ di Jakarta, Rabu, 5/3/2025.²⁹

Situasi ekonomi kita amburadul. Menurut Yanuar Nugroho, “Saat Prabowo dilantik (20/10/2024) IHSG di level 7.772,60; pada 21/3/2025, IHSG ditutup di level 6.258,18. Dengan demikian IHSG turun 1.514,42 poin atau 19,48% sejak Prabowo menjabat. Bukankah ini pesan yang amat jelas dari pasar?” (*Kompas*, 26/03/2025: 6). Bukannya serius menangani isu ekonomi, jawaban Presiden Prabowo enteng-enteng saja, malah bercanda. “Prabowo sempat melempar candaan soal jatuhnya IHSG hingga 6% beberapa waktu lalu kepada para menterinya di Sidang Kabinet Paripurna. Dia menyatakan naik turunnya harga saham bukan masalah bagi negara selama harga pangan aman. Prabowo juga pernah menyebut bermain saham di pasar modal adalah judi. Lebih baik banyak rakyat Indonesia tak punya saham”.³⁰ Di satu sisi, bisa jadi ini cermin seorang timokrat yang memang anti-intelektualitas, di sisi lain, bisa jadi ia tidak merasa perlu mengkhawatir apa-apa dengan situasi ekonomi

karena dia sudah mengamankan 300 triliun: “Dalam 100 hari pertama (kerja), kami berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun, hampir US\$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran,” kata Prabowo.³¹

Karena Danantara bukan APBN, sehingga tidak perlu persetujuan DPR, uang sebesar itu untuk apa? Gelap.

Seirama dengan tren global turunnya demokrasi, kita merasakan legalisme autokratis yang menjadi-jadi. Khas untuk Indonesia, surutnya demokrasi dibarengi munculnya timokrasi ketika soal harga diri menjadi pertarungan terpenting. Sang timokrat percaya bahwa program-programnya yang tak masuk akal adalah demi kejayaan bangsa dan dirinya. Sedemikian jaga gengsi dan *over* percaya dirikah sehingga segala masukan soal hukum dan ekonomi akan dikibaskan dengan “*ndasmu*”? Hati-hati, Pak, taruhannya negara ini bisa karam. ●

A. Setyo Wibowo,
dosen STF Driyarkara, Jakarta.

Red.: Sebagian naskah ini sudah dipresentasikan tanggal 12 Mei 2024 saat penulis menjadi narasumber dalam acara “Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Rujukan

- A. Setyo Wibowo, *Arete: Hidup Sukses Menurut Platon*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2010.
- A. Setyo Wibowo, *Paideia: Filsafat Pendidikan – Politik Platon*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.
- Edmond Lévy, *Sparte : Histoire politique et sociale jusqu'à la conquête romaine*, Paris: Editions du Seuil, 2003.
- Georges Leroux, *Platon, La République*, Traduction inédite, Paris: G. F. Flammarion, 2002.
- Laraswati Ariadne Anwar menyarikan pendapat M. Haripin, “Militarisme, Otoritarisme, dan Korupsi Rusak Demokrasi”, *Kompas*, Senin, 24 Maret 2025, hlm. 4.
- Moisés Naim *The Revenge of Power*, New York: St. Martin's Press, 2022.
- Platon, *Politeia* atau *The Republic*.
- Werner Jaeger, *Paideia : The Ideals of Greek Culture*, Oxford: Basil Blackwell, 1954.
- Yanuar Nugroho, “Tuan, Jangan Biarkan Reformasi Mati”, *Kompas*, Rabu, 26 Maret 2025, hlm. 6

Catatan akhir

- (<https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/18/160000965/prabowo-sebut-ndasmu-etik-ini-artinya-menurut-ahli-filologi-jawa->)
- (<https://www.tempo.co/politik/prabowo-sebut-ndasmu-di-kongres-pan-sebelumnya-katakan-ndasmu-etik-di-rakornas-gerindra-apa-konteksnya--14864>)

3. (<https://www.tempo.co/sains/hut-gerindra-prabowo-semptat-menjawab-kritik-dengan-kata-bahasa-jawa-maknanya--1208524>)
4. (<https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/14343561/sebut-masa-depan-gemilang-prabowo-biar-anjing-mengggonggong-kita-maju-terus>)
5. (<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7780938/teriakan-hidup-jokowi-menggema-di-hut-gerindra>)
6. (<https://www.tempo.co/politik/kpai-anggap-ujaran-deddy-corbuzier-soal-makan-bergizi-gratis-tergolong-kekerasan-psikologis-1198527>)
7. (<https://www.antaranews.com/berita/4640941/deddy-corbuzier-diangkat-jadi-staf-khusus-menhan>)
8. (<https://nasional.kompas.com/read/2025/03/22/14005761/hasan-nasbi-jelaskan-pernyataan-kepala-babi-untuk-jurnalis-tempo-dimasak?page=all>)
9. (<https://rmol.id/politik/read/2025/03/24/660848/kepala-babi-bangkai-tikus-belum-bisa-disebut-teror>)
10. (<https://www.sonora.id/read/423206158/ngeri-ini-5-ciri-rumah-atau-tempat-usaha-terkena-serangan-santet-tanah-kuburan>)
11. (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250324/9/1864066/ihsg-merosot-tito-ekonomi-ri-lebih-hebat-dari-timor-leste>)
12. (<https://www.tempo.co/politik/prabowo-tanggapi-kritik-kabinet-gemuk-enggak-peduli-yang-penting-hasilnya-1207720>)
13. (<https://www.voaindonesia.com/a/ndasmu-dan-kau-yang-gelap-indikasi-kemunduran-komunikasi-politik-/7988355.html>)
14. (<https://www.tempo.co/politik/sebelumnya-bilang-akan-kejar-koruptor-walau-sampai-antartika-kini-prabowo-wacanakan-ampuni-koruptor--1184199>)
15. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-kritis-pshk-untuk-ruu-tni-lt67db8c4673184/>)
16. (<https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/dpr-sahkan-uu-tni-tetap-kedepankan-prinsip-demokrasi/>)
17. (<https://kumparan.com/kumparannews/catatan-koalisi-masyarakat-soal-ruu-tni-yang-dinilai-hidupkan-lagi-dwifungsi-24dJcyZoO9R>)
18. (<https://www.tempo.co/politik/dulu-tegas-menolak-pdip-kini-ikut-mendukung-revisi-uu-tni-1221515>)
19. (<https://www.kompas.tv/nasional/582834/puan-soal-penolakan-terhadap-uu-tni-tolong-baca-baik-baik-dulu-isinya>)
20. (https://www.setneg.go.id/baca/index/usai_retreat_jajaran_kabinet_merah_putih_bawa_semangat_kebersamaan_ke_jakarta)
21. (<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/20/06451261/mengapa-kepala-daerah-harus-mengikuti-retret-di-akmil-magelang?>)
22. (<https://news.detik.com/berita/d-7840265/gelombang-demo-tolak-uu-tni-meluas-ke-berbagai-daerah>)
23. (<https://bandung.kompas.com/read/2025/03/19/162409578/natalius-pigai-sebut-pihak-yang-tolak-ruu-tni-kurang-kerjaan-dan-buzzer>)
24. (<https://www.tempo.co/politik/penggunaan-narasi-antek-asing-oleh-prabowo-1223654>)
25. (<https://news.detik.com/pemilu/d-7273666/romo-magnis-di-sidang-mk-tindakan-presiden-harus-demi-keselamatan-semua>)
26. (<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/22/bansos-dari-bantuan-negara-hingga-politisasi>)
27. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240507105312-4-536315/sah-putin-presiden-seumur-hidup-rusia-bakal-gelar-pelantikan-mewah>)
28. (<https://kabar24.bisnis.com/read/20220928/19/1582107/kemenangan-giorgia-meloni-mussolini-dan-fasisme-di-italia>)
29. (<https://market.bisnis.com/read/20250317/7/1861916/suara-investor-soal-bareskrim-polri-ikut-pantau-saham>)
30. (<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-7841747/dear-pak-prabowo-candaan-soal-saham-bisa-bikin-geger-pasar-modal>)
31. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7792628/prabowo-sebut-hasil-efisiensi-rp-300-triliun-dialokasikan-ke-danantara>)